



## Badung Gelontor Ratusan Miliar untuk Enam Kabupaten

**Mangupura (Bali Post)**—

Enam kabupaten di Bali, yakni Karangasem, Buleleng, Klungkung, Jembrana, Tabanan, dan Bangli mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung. Tidak tanggung-tanggung, dana berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini mencapai ratusan miliar rupiah pada tahun anggaran 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Badung I Ketut Gede Suyasa mengatakan realisasi bantuan untuk enam kabupaten tersebut sebesar Rp 180 miliar. Sedangkan pada anggaran perubahan dirancang sebesar Rp 139.657.070.487. "Dana itu dibagi merata dengan masing-masing kabupaten mendapatkan dana sebesar Rp 30 miliar. BKK kepada enam kabupaten ini peruntukannya belum ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum ada proposal dari ke enam kabupaten yang masuk ke Badung," ujar Suyasa, Kamis (26/7) kemarin.

Terkait dana hibah, Suyasa menyebutkan dana hibah dari APBD perubahan tahun 2018 sebesar Rp 206.600.000.000. Dalam realisasinya hibah secara keseluruhan untuk kelompok atau masyarakat hingga saat ini sebesar Rp. 503.236.673.00. "Hibah kelompok atau anggota masyarakat ini dominan digunakan untuk pembangunan atau renovasi pura. Selebihnya pembangunan bale banjar, sanggar atau *sekaa*, bantuan untuk subak, bantuan untuk ke-

lompok tani dan ternak, yayasan, dan lainnya, sesuai dengan usulan masyarakat," ujarnya.

Suyasa menambahkan, realisasi penerima hibah mencapai 897 penerima. Sebelumnya pada APBD induk, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat berjumlah 1.712 penerima hibah yang digelontor anggaran Rp 662.432.271.060,00. "Sebelumnya pada ABP induk kan sudah ada penerima hibah. Jadi, ini sisanya dirancang pada APBD perubahan 2018," katanya.

Di sisi lain, pemberian bantuan untuk enam kabupaten lainnya di Bali juga diakui Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Program ini dinilai telah sesuai dengan kesepakatan antarenam kabupaten, seperti Klungkung, Karangasem, Jembrana, Buleleng, Tabanan, dan Bangli. "Dana itu tidak hanya untuk di Kabupaten Klungkung saja, tapi kabupaten lain juga mendapatkannya. Namun, besarnya tidak sama," katanya.

Ia menegaskan, pemberian bantuan tersebut bukan dilatari masalah tahun politik. Namun atas dasar kesepakatan para bupati-bupati yang dulunya telah meneken MoU untuk pemberian dana dan PHR Kabupaten Badung. "Saat ini keuangan Kabupaten Badung mencukupi. Untuk itu, perlu memberikan pemerataan ke kabupaten lain, sehingga terwujud pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Bali," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Senin, 27 Juli 2018

Hal : 3